
PEDANG, BATU DAN DOA: STRATEGI AIRLANGGA DALAM MEMBANGUN KEMBALI KEKUASAAN ATAS JAWA

Hari Fitria Utama

Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia

Email: harifitriautama812@gmail.com

Abstrak

Pasca peristiwa Pralaya yang meruntuhkan Kerajaan, Airlangga menghadapi tantangan kompleks untuk merestorasi kekuasaan di Jawa yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan kekuatan fisik. Penelitian ini bertujuan mengungkap strategi Airlangga dalam membangun kembali hegemoninya dengan menguji hipotesis pendekatan tripartit: Jalan Pedang, Batu, dan Doa. Menggunakan metode kualitatif melalui tahapan pengumpulan data prasasti, analisis, dan interpretasi historis, penelitian ini membedah kebijakan-kebijakan strategis Airlangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Airlangga menerapkan pola kebijakan integratif: “Jalan Pedang” berfungsi sebagai penaklukan militer untuk keamanan, “Jalan Batu” sebagai diplomasi ekonomi melalui infrastruktur, dan “Jalan Doa” sebagai upaya memperoleh legitimasi transendental. Disimpulkan bahwa kesuksesan Airlangga bukan bertumpu pada satu kekuatan tunggal, melainkan sinergitas antara militer, kemakmuran ekonomi, dan dogma agama yang efektif mengubah kepatuhan koersif menjadi loyalitas politik yang langgeng.

Kata kunci: Airlangga; Mahapralaya; Diplomasi Ekonomi; Legitimasi Kekuasaan; Prasasti.

SWORD, STONES, AND PRAYERS: AIRLANGGA’S STRATEGY IN REBUILDING POWER OVER JAVA

Abstract

After the Mahapralaya incident that destroyed the Kingdom, Airlangga faced tough challenges in restoring power in Java. These issues could not be solved by physical force alone. This study aims to uncover Airlangga’s strategy for rebuilding his authority by examining a tripartite approach: the Way of the Sword, the Stone, and the Prayer. Using qualitative methods, the study involves stages of data collection, analysis, and historical interpretation to explore Airlangga’s strategic policies. The results show that Airlangga used an integrative policy pattern. The “Way of the Sword” served as a military conquest for security. The “Way of the Stone” represented economic diplomacy through infrastructure. Finally, the “Way of the Prayer” sought to gain religious legitimacy. The conclusion is that Airlangga’s success did not depend on a single form of power. Instead, it came from the combination of military strength, economic growth, and religious beliefs, which effectively turned forced obedience into lasting political loyalty.

Keyword: Airlangga; Mahapralaya; Economic Diplomacy; Legitimacy of Power; Inscription.

I. PENDAHULUAN

Peristiwa *Mahapralaya* dianggap sebagai konsep kiamat yang berkembang di wilayah Jawa (Utama & Subekti, 2023). Menurut Moniz (2015) *Mahapralaya* merupakan fase terakhir dari sebuah siklus zaman. Konsep ini terkait dengan kepercayaan Hindu dimana *Mahapralaya* dimaknai sebagai hancurnya tatanan dunia di ujung zaman Kaliyuga (Wibowo, 2015). Pada peristiwa *Mahapralaya*, dunia digambarkan mengalami ketidakseimbangan yang pada gilirannya mewujudkan menjadi kehancuran alam maupun kehancuran tatanan sosial (Schrieke, 2016).

Naskah masuk: 10-02-2026; Revisi akhir: 01-05-2026; Disetujui terbit: 17-06-2026

Selain itu, dalam Schrieke (2016) dinyatakan bahwa orang Jawa meyakini setelah adanya *Mahapralaya* akan memunculkan era baru yang membawa kejayaan bagi umat manusia. Karena itu terjadinya *Mahapralaya* merupakan sebuah tahap pengantar yang akan memunculkan suatu kepercayaan yakni munculnya penguasa baru yang memerintah pasca *Mahapralaya*. Kepercayaan tersebut muncul dari kitab *Agastyaparwa* yang mengatakan bahwa ketika keempat tahap zaman kehidupan dan keempat kasta dapat berlaku dengan harmoni, maka dunia dan umat manusia akan dapat mencapai kebahagiaan. Terwujudnya kondisi yang demikian akan membuat raja dan keluarga beserta seluruh keturunannya terlepas dari penderitaan (Gonda, 1936; Schrieke, 2016).

Peristiwa *Mahapralaya* yang tercatat dalam prasasti adalah yang terjadi pada tahun 1017 M (Hardiati dkk., 2010), peristiwa tersebut merupakan titik balik penting dalam sejarah masa Jawa Kuno, dimana secara efektif mengakhiri keberadaan Kerajaan yang diperintah oleh Dharmawangsa Teguh. Perwujudan dari peristiwa *Mahapralaya* masa ini adalah adanya serangan oleh Haji Wurawari dari Lwaram, yang diidentifikasi sebagai seorang raja bawahan (*vassal*) yang memberontak terhadap kekuasaan pusat. Lokasi Wurawari diidentifikasi berada di daerah Banyumas saat ini (Hardiati dkk., 2010), sedangkan Lwaram sendiri terletak di sekitar daerah Cepu dimana terdapat desa bernama Ngloram. Tragedi ini terjadi secara mendadak, ketika istana milik Dharmawangsa Teguh sedang mengadakan upacara pernikahan agung antara putri Dharmawangsa, Sri Sanggramawijaya, dengan Airlangga (Muljana, 2006). Akibat dari serangan mendadak tersebut tidak hanya meruntuhkan ibu kota, tetapi juga menewaskan Dharmawangsa Teguh beserta sebagian besar bangsawan dan petinggi kerajaan, meninggalkan kekosongan kekuasaan yang mendalam di Jawa bagian timur.

Implikasi terjadinya peristiwa *Mahapralaya* tahun 1017 M ini adalah terfragmentasinya bekas wilayah kekuasaan Dharmawangsa Teguh. Sebagaimana terbayang dalam Prasasti Pucangan (1041 M) yang dikeluarkan oleh Airlangga, prasasti tersebut menggambarkan masa ini sebagai masa penuh peperangan (Hardiati dkk., 2010). Pada Prasasti Pucangan tersebut diceritakan bahwa Airlangga melakukan beberapa kali peperangan untuk menaklukkan beberapa penguasa daerah. Adanya penaklukan tersebut menunjukkan bahwa bekas wilayah kerajaan terpecah menjadi beberapa entitas politik yang lebih kecil, serta banyak tersebar sebagai akibat dari runtuhnya kekuasaan Dharmawangsa Teguh. Airlangga adalah korban yang selamat dari peristiwa *Mahapralaya* tersebut, selama beberapa tahun, Airlangga terpaksa melarikan diri ke hutan (Hardiati dkk., 2010).

Terpecahnya wilayah bekas kekuasaan Dharmawangsa Teguh diantaranya yang disebutkan dalam prasasti Pucangan adalah daerah Wuratan dengan rajanya bernama Wisnuprabhawa, daerah Wengker dirajai oleh seseorang bernama Panuda dan juga daerah Wurawari (Hardiati dkk., 2010). Daerah lain yang tidak disebutkan dalam prasasti Pucangan adalah daerah yang diperintah oleh raja Hasin, yang kemudian berhasil ditaklukan oleh Airlangga. Peristiwa ini dicatat dalam prasasti Baru (1030 M) (Hardiati dkk., 2010).

Setelah peristiwa *Mahapralaya* maka sebagaimana dalam kutipan kitab *Agastyaparwa* yang telah disinggung diatas. Maka seorang raja diharapkan mampu untuk menjadi ‘Juru Selamat’ yang akan membawa kemakmuran kembali pada rakyatnya. Dengan demikian, seorang raja perlu untuk berjuang demi mendapatkan kembali legitimasi dan menegakkan kuasanya. Sebagaimana dalam Teori Kekuasaan dan Bencana yang menjelaskan bahwa terdapat kaitan antara kekuasaan dan kemaslahatan setelah terjadinya suatu bencana. Seorang penguasa mesti memberikan ‘ganti rugi’ bagi rakyatnya yang menderita kemudian sebagai balasannya penguasa tersebut akan mendapatkan legitimasi atas kekuasaannya (Mascarenhas & Wisner, 2012).

Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini berusaha untuk menganalisis usaha-usaha Airlangga dalam membangun kembali kerajaan dan mendapatkan legitimasi setelah terjadinya peristiwa *Mahapralaya*. Usaha yang digunakan oleh Airlangga dapat diketahui dari kebijakan yang dikeluarkannya. Kebijakan tersebut tercatat dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkan selama masa kekuasaannya.

Mengenai pemilihan Airlangga sebagai subjek penelitian ini dikarenakan masa pemerintahannya yang bertepatan langsung setelah terjadinya *Mahapralaya* atau bencana besar. Akan tetapi menurut Alnoza (2021), dalam artikelnya menjelaskan bahwa terdapat raja lain yang juga memerintah setelah terjadinya bencana, yakni Pu Sindok dimana dia menghadapi letusan Gunung Merapi. Peristiwa itu menurut Alnoza (2021) dianggap sebagai *Mahapralaya* yang menyebabkan perpindahan pusat kerajaan ke wilayah Jawa bagian timur. Namun pendapat yang mengatakan adanya bencana pada era Pu Sindok telah dibantah oleh artikel dari Andreastuti dkk. (2006) yang menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti adanya letusan yang sampai menyebabkan bencana besar sehingga Pu Sindok harus memindahkan istananya ke Jawa bagian timur. Oleh karena itu dipilihnya Airlangga disini merupakan sebuah keputusan yang lebih kuat secara data historis dibandingkan dengan Pu Sindok.

Selanjutnya tujuan penelitian di atas dituangkan dalam suatu rumusan masalah, yaitu upaya apa yang digunakan oleh Airlangga dalam membangun kekuasaan kembali dan mendapatkan legitimasi setelah terjadinya *Mahapralaya*? Untuk menjawab rumusan tersebut, penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Susanti (2010). Pada penelitiannya ditemukan bahwa Airlangga cenderung berfokus pada penaklukan militer. Kemudian penelitian lain dari Alnoza (2021) juga membahas mengenai bagaimana Airlangga mengatasi hambatan legitimasi dengan cara banyak memberikan anugrah *sima* kepada daerah bawahan yang telah membantunya berperang. Selain itu, Airlangga juga berusaha menggambarkan dirinya sebagai Wisnu dengan sifat penghancur, lagi-lagi dengan cara peperangan militer.

Padahal apabila dilihat dari berbagai prasasti yang dikeluarkannya selama memerintah, terdapat kebijakan lain yang bisa dilihat sebagai strategi non-militer. Seperti dalam Prasasti Kamalagyan (1037 M), dimana Airlangga memperbaiki bendung Waringin Sapta (Setiawan, 2021). Kemudian dalam Prasasti Gandhakuti (1042 M), Airlangga menetapkan *sima* untuk sebuah

bangunan suci (Susanti, 2010). Dari pengamatan pada kebijakan dalam prasasti-prasasti Airlangga di atas dapat diamati adanya semacam sinergi antara penaklukan militer, pembangunan infrastruktur dan legitimasi religius sebagai sebuah kesatuan strategi pembangunan kerajaan setelah peristiwa *Mahapralaya*. Namun hal ini, masih jarang diteliti secara mendalam.

Karena itu maka penelitian ini berusaha untuk menutup celah dengan mengambil sudut pandang bahwa usaha pembangunan kekuasaan oleh Airlangga adalah dengan menggunakan upaya yang disebut sebagai ‘strategi tripartit’. Strategi tersebut terdiri dari tiga pilar yang saling berhubungan yakni: pertama, penggunaan kekuatan militer dengan cara penaklukan (jalan pedang); kedua, pembangunan infrastruktur penting untuk mengembangkan kemakmuran (jalan batu); dan ketiga, penggunaan legitimasi spiritual keagamaan untuk membuat kekuasaannya terkesan sakral (jalan doa). Jadi berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memandang kesuksesan Airlangga secara parsial. Penelitian ini mengusulkan argumen bahwa, pembangunan kekuasaan Airlangga merupakan hasil integrasi dari berbagai strategi atau yang pada penelitian ini disebut ‘Jalan.’

Metode sejarah dengan pendekatan deskriptif-analitis digunakan dalam penelitian ini. Metode ini terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan hasil alih aksara dan alih bahasa prasasti masa Airlangga. Data sekunder didapatkan melalui studi pustaka komprehensif pada literatur sejarah Jawa Kuno, laporan penelitian arkeologi serta jurnal ilmiah terkait. Tahap kritik sumber dilaksanakan untuk memastikan validitas data, yakni meliputi kritik eksternal untuk memverifikasi keaslian prasasti berdasarkan kajian pada aksara dan angka tahun, kemudian kritik internal untuk mengkaji kredibilitas informasi yang termuat dalam prasasti sebagai dokumen kebijakan politik Airlangga. Data prasasti yang dipilih, secara sengaja dibatasi pada prasasti yang berangka tahun. Batasan ini penting untuk menjaga ketepatan pelacakan kebijakan Airlangga secara kronologis pasca terjadinya *Mahapralaya*, sehingga perkembangan pembangunan kekuasaannya dapat dipahami dengan tepat. Data tersebut kemudian dianalisis dengan teknik *content analysis* untuk mengelompokkan kebijakan pada prasasti ke dalam kategori ‘Jalan Pedang’, ‘Jalan Batu’ dan ‘Jalan Doa.’ Selanjutnya tahap interpretasi dilakukan dengan menggunakan Teori Kekuasaan dan Bencana dalam Mascarenhas & Wisner (2012). Teori ini berfungsi untuk membedah tujuan dari pemberian anugerah *sima* yang bukan hanya sebagai pemberian biasa. Namun memiliki tujuan untuk memberikan ‘ganti rugi’ setelah terjadinya bencana guna mendapatkan legitimasi politik kembali yang sebelumnya runtuh akibat *Mahapralaya*. Kemudian tahap terakhir yakni historiografi dilakukan dengan penyusunan hasil penelitian dalam bentuk artikel jurnal.

II. PEMBAHASAN

A. Data Prasasti

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah hasil dari seleksi melalui kriteria kritik sumber baik internal maupun eksternal untuk memastikan validitas dan ketepatan analisis. Peneliti dengan sengaja membatasi data primer hanya pada prasasti-prasasti yang memiliki angka tahun secara eksplisit dan telah dialihaksara dan alihbahasakan oleh ahli epigrafi yang otoritatif. Pembatasan ini merupakan suatu langkah metodologis untuk menjaga ketepatan secara kronologi, mengingat penelitian ini berupaya melacak perkembangan strategi pemulihan kekuasaan Airlangga. Tanpa adanya kepastian angka tahun pada prasasti, hubungan antar-kebijakan akan sulit untuk dibuktikan secara ilmiah.

Selain itu, fokus pada data prasasti yang telah terverifikasi secara akademis bertujuan untuk meminimalisir kerancuan pada pembacaan teks, sehingga peneliti dapat berfokus pada interpretasi dan analisis kebijakan. Meskipun data dibatasi hanya pada prasasti berangka tahun, pendekatan kritis juga tetap diterapkan dengan mengamati teks-teks tersebut. Informasi pada prasasti tidak hanya dipandang sebagai fakta objektif, melainkan juga alat legitimasi politik yang perlu dibedah maknanya. Berdasarkan kriteria tersebut, berikut adalah daftar prasasti yang menjadi data analisis utama pada penelitian ini (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Prasasti yang memuat kebijakan Airlangga

No.	Nama Prasasti	Angka Tahun	Deskripsi
1	Prasasti Cane	943 S (1021 M) (Damais, 1955)	Prasasti ditemukan di Cane, Candisari, Sambeng, Lamongan. Saat ini disimpan di Museum Nasional Indonesia (Aulia & Wisnu, 2023). Ditulis di sebuah batu menggunakan aksara kawi berbahasa Jawa Kuno. Isi prasasti yakni penetapan <i>sima karaman</i> untuk membalas budi atas warga desa yang membantu Airlangga sebagai “benteng” di wilayah barat kerajaan pada saat awal Airlangga melaksanakan konsolidasi kekuasaannya (Hardiati dkk., 2010).
2	Prasasti Munggut	944 S (1022 M) (Damais, 1955)	Prasasti ini terletak <i>insitu</i> di Dusun Sumbergurit, Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Ditulis dengan aksara Kawi berbahasa Jawa Kuno (Damais, 1955). Berisi pemberian <i>sima</i> oleh Airlangga kepada penduduk Desa Munggut. Adapun sebab pemberian <i>sima</i> adalah untuk pemujaan kepada <i>buyut suksma</i> (leluhur tak terlihat) (Nastiti dkk., 2022).

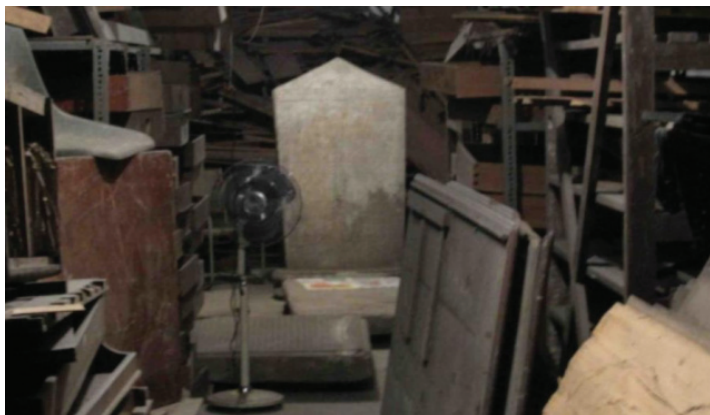
No.	Nama Prasasti	Angka Tahun	Deskripsi
3	Prasasti Kusambyan	945 S (1023 M) (Nastiti dkk., 2022)	Prasasti Kusambyan terukir pada sebuah batu, terletak di dusun Grogol, desa Katemas, kec. Kudu, kab. Jombang, tidak jauh dari prasasti Munggut. Berisi penetapan desa Kusambyan sebagai <i>sima</i> untuk memuja <i>bhaṭāra hyaṇ ivak</i> . <i>Sima</i> tersebut diberikan sebagai balas budi atas pengorbanan besar penduduk Kusambyan terhadap raja di masa perang (Nastiti dkk., 2022).
4	Prasasti Kakurugan I	945 S (1023 M) (Damais, 1955)	Prasasti <i>tinulad</i> masa Majapahit ini ditemukan di daerah Surabaya, ditulis pada sebuah lempeng tembaga dengan aksara Kawi berbahasa Jawa Kuno (Museum Nasional, 1985). Berisi pemberian hak istimewa karena kebaktian yang tinggi pada raja (Membantu mempertahankan wilayah). Hak tersebut diberikan kepada Dyah Kaki Ngadulengen (Susanti, 2010; Astriana & Wisnu, 2019).
5	Prasasti Baru	952 S (1030 M) (Damais, 1955)	Prasasti ini berasal dari daerah Surabaya, kemudian sekarang terletak di Museum Nasional Indonesia, ditulis pada sebuah batu dengan aksara Kawi berbahasa Jawa Kuno. (Brandes, 1913; Damais, 1955). Berisi pemenuhan janji berupa penetapan <i>sima</i> kepada Desa Baru karena melindungi raja selama perang melawan raja Hasin, berkat perlindungan warga Desa Baru, raja Airlangga dapat memenangkan perang tersebut (Djafar, 2016).
6	Prasasti Terep I	954 S (1032 M) (Damais, 1955)	Prasasti Terep I ditemukan di sekitar Gunung Penanggungan, saat ini berada di Museum Nasional Indonesia (Museum Nasional, 1985). Prasasti ini dituliskan dalam lempeng tembaga dengan aksara Kawi dan Bahasa Jawa Kuno (Damais, 1955). Isi prasasti adalah pemberian <i>sima</i> pada sebuah pertapaan di Terep dan pemberian hak istimewa kepada Rakē Pañkaja Dyah Tumabong yang senantiasa mendoakan Airlangga saat melarikan diri (Susanti, 2010).

No.	Nama Prasasti	Angka Tahun	Deskripsi
7	Prasasti Pucangan Sanskerta	959 S (1037 M) (Witasari, 2009; Alnoza, 2021)	Berasal dari Jawa Timur, sekitar lereng Gunung Penanggungan, dipahatkan dalam sebuah batu dengan dua bahasa yakni Sansekerta dan Jawa Kuno, saat ini berada di Museum Kolkata India (Hardiati dkk., 2010). Pada bagian berbahasa Sansekerta ini berisi silsilah Airlangga dan kisah serangan-serangannya sejak 1029 - 1037 M (Witasari, 2009).
8	Prasasti Turunhyang A	958 S (1036 M) (Susanti, 2010; Alnoza, 2021)	Ditemukan di Desa Truneng, Kemlagi, Mojokerto (Brandes, 1913). Saat ini disimpan di Museum Trowulan, berisi penetapan <i>sima</i> di Turunhyang bagi bangunan suci yang menjadi tanda kesempurnaan penguasa <i>Cakravartin</i> (Airlangga) yang tidak lagi memiliki musuh (Nugroho, 2015).
9	Prasasti Kamalagyan	959 S (1037 M) (Damais, 1955)	Prasasti ini terletak insitu di Desa Tropodo, Krian, Sidoarjo, tertulis pada batu dengan aksara dan bahasa Kawi (Damais, 1955). Berisi penetapan <i>sima</i> Desa Kamalagyan untuk memelihara bendungan Waringin Sapta (Setiawan, 2021).
10	Prasasti Pucangan Jawa Kuno	963 S (1041 M) (Damais, 1955)	Berasal dari Jawa Timur, sekitar lereng Gunung Penanggungan, dipahatkan dalam sebuah batu dengan dua bahasa yakni Sansekerta dan Jawa Kuno, saat ini berada di Museum Kolkata India (Hardiati dkk., 2010). Bagian yang berbahasa Jawa Kuno berisi keterangan penetapan <i>sima</i> atas Desa Barahem, Pucangan dan Cepuri. Peristiwa ini didasari adanya sumpah raja ketika terjadi <i>mahapralaya</i> . Selain itu, dalam prasasti ini juga disebutkan kampanye yang dilakukan Airlangga hingga puncak takluknya Jawa di tahun 1041 M (Witasari, 2009).
11	Prasasti Pandan	964 S (1042 M) (Susanti, 2010; Alnoza, 2021)	Prasasti ini terpecah kedalam beberapa fragmen, ditemukan di Desa Pandankrajan, Kemlagi, Mojokerto. Prasasti ini ditulis menggunakan bahasa Jawa Kuno dan berisi pemberian anugerah <i>sima</i> karena jasa rakyat membantu raja dalam mengalahkan musuh (Nugroho, 2015).

No.	Nama Prasasti	Angka Tahun	Deskripsi
12	Prasasti Gandhakuti	964 S (1042 M) (Damais, 1955)	Prasasti <i>tinulad</i> lempeng tembaga ini ditemukan di daerah Keboan Pasar Sidoarjo dan kini berada di Museum Nasional Indonesia, prasasti ini beraksara dan berbahasa Jawa Kuno (Brandes, 1913; Damais, 1955). Isi prasasti ini berupa penetapan <i>sima</i> kepada bangunan suci di Desa Kambang Sri. Selain itu, pada prasasti ini Airlangga dijuluki sebagai Paduka Mpungku, menandakan sudah memasuki masa akhir pemerintahannya (Susanti, 2010).
13	Prasasti Pasar Legi	965 S (1043 M) (Susanti, 2010; Alnoza, 2021)	Prasasti ini terletak di Dusun Blawi, Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan (Nastiti dkk., 2023). Berisi pemberian anugerah oleh Airlangga kepada Desa Patakan. Diperkirakan karena penduduk desa membantu Airlangga dalam masa pelariannya dari keraton Wwatan Mas (Susanti, 2010).

B. Jalan Pedang

Prasasti Pucangan mencatat bahwa setelah serangan Haji Wurawari, Airlangga berhasil meloloskan diri ke hutan bersama dengan abadinya yang bernama Narottama (Hardiati dkk., 2010). Pada saat di hutan Airlangga senantiasa melakukan puja pada dewa, sehingga dewa mencurahkan cinta dan belas kasihan kepadanya. Masih dalam Prasasti Pucangan, dinyatakan bahwa dewa ingin Airlangga kembali memulihkan tatanan dunia dengan menggantikan kedudukan leluhurnya, memperoleh kebahagiaan berupa kerajaan, memperbaiki bangunan suci dan menghancurkan semua kekuatan jahat yang ada di dunia. Hingga pada akhirnya pada tahun 941 S (1019 M) Airlangga dengan restu para pendeta, dimahkotai sebagai raja.



Gambar 1. Prasasti Pucangan
Sumber: Wirayudha, 2024

Pada Prasasti Cane, Kusambyan, Kakurungan, Baru, Pucangan Sansekerta, Pandan dan Pasar Legi. Kita dapat mengetahui bahwa Airlangga banyak memberikan anugerah *sima* sebagai balas budi atas bantuan yang dia dapatkan dari penduduk penerima *sima* tersebut. Bantuan yang didapatkan berupa kesediaan penduduk untuk mendukung upaya perangnya. Kita dapat mengetahui bahwa dalam mewujudkan keinginannya untuk menjadi penguasa, ternyata Airlangga menghadapi banyak rintangan berupa musuh-musuh yang tidak mau mengakuinya sebagai raja. Oleh karena itu, Airlangga banyak melakukan peperangan, bahkan sempat terusir dan harus melarikan diri.

Penggunaan Jalan Pedang ini merupakan upaya yang efektif untuk memaksakan ketertiban (*order*). Airlangga mesti menggunakan kekuatan militer untuk menghancurkan para penguasa lokal yang tidak ingin tunduk begitu saja setelah mengalami kemerdekaan. Kemudian menyatukan kembali wilayah-wilayah mereka kedalam kerajaan sebagaimana dulu leluhurnya memerintah. Karena tanpa adanya penaklukan tersebut, Airlangga tidak akan memiliki ruang untuk memerintah. Selain itu, sebagaimana disebutkan di pendahuluan bahwa terwujudnya *order* atau harmoni akan membuat seorang raja terlepas dari penderitaan (Gonda, 1936; Schrieke, 2016).

Meskipun informasi dari prasasti memberikan rincian kronologis mengenai adanya penaklukan militer, analisis terhadap capaian Jalan Pedang tidak dapat dilepaskan dari fungsi prasasti sebagai alat legitimasi serta propaganda politik. Deskripsi pada Prasasti Pucangan yang menggambarkan lawan Airlangga sebagai sosok yang mengacaukan dunia mesti disikapi secara kritis sebagai bentuk narasi tunggal dari seorang penguasa. Dalam tradisi politik Jawa Kuno, penggunaan dikotomi ‘kekacauan’ (*chaos*) melawan ‘ketertiban’ (*order*) sering kali digunakan untuk membenarkan tindakan militer sebagai perbuatan suci demi mengembalikan tatanan keseimbangan di dunia. Oleh karena itu, Jalan Pedang tidak hanya sekadar catatan peperangan objektif, tetapi merupakan sebuah ‘apologi’ untuk menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan Airlangga adalah benar dan diperlukan untuk memulihkan tatanan yang hancur pasca *Mahapralaya*.

Selain fungsi praktis dari penaklukan, Jalan Pedang juga mempunyai fungsi untuk memperkuat legitimasi Airlangga sebagai seorang *cakravartin*, yang pada akhirnya dinyatakan dalam Prasasti Turunhyang A. Selain itu Jalan Pedang juga sesuai dengan *laku* atau perbuatan Dewa Yama yaitu dengan memberi hukuman berat bagi kejahatan, dan Dewa Agni yakni dengan menghancurkan musuh-musuhnya. Dua *laku* tersebut terdapat dalam *astabrata* atau delapan *laku* ideal bagi seorang penguasa (Utama & Subekti, 2023). Kemudian dalam konsep kekuasaan di Jawa Kuno, seorang penguasa akan dianggap mempunyai wahyu atau karisma keilahian apabila telah mampu menunjukkan keunggulan fisik di medan peperangan (Wolters, 1999; Upaya, 2010). Airlangga sendiri memulai perjuangannya dari hutan sebagai seorang pelarian, tentunya dia memiliki legitimasi yang rendah dalam pandangan rakyat dan lawannya. Penaklukan yang dilakukan juga sebagai pembuktian bahwa ‘kesaktian’ serta berkat dari dewata telah dicurahkan kepadanya. Jalan Pedang merupakan upaya dari Airlangga untuk menunjukkan kepada rakyat dan lawannya bahwa dia adalah pewaris sah tahta selain dari penulisan silsilah pada Prasasti

Pucangan. Airlangga melalui Jalan Pedang juga membuktikan bahwa dia adalah orang yang mampu melindungi rakyat melalui pemulihan ketertiban, bukan hanya sekadar seorang pangeran pelarian yang lemah.

Perlu untuk diingat bahwa Jalan Pedang yang dilalui Airlangga tidak selalu berwujud sebagai bentuk konfrontasi fisik di medan pertempuran. Terdapat juga sisi diplomasi di mana prasasti penetapan *sima*, seperti Prasasti Baru – meskipun terdapat sisi perang melawan Raja Hasin di dalamnya. Juga memuat adanya penetapan janji Airlangga pada Desa Baru (Djafar, 2016). Hal tersebut digunakan sebagai wujud diplomasi untuk mengikat kesetiaan penguasa lokal tanpa memerlukan pertempuran. Jadi dalam prasasti tersebut anugrah *sima* selain sebagai wujud terima kasih juga sebagai wujud tindakan pengikatan loyalitas kepada penguasa pusat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan pedang hanyalah pembuka jalan bagi konsolidasi politik yang lebih halus, di mana loyalitas dibangun melalui ‘janji politik’ anugrah *sima* bagi penguasa daerah yang bersedia setia di bawah kekuasaan Airlangga.



Gambar 2. Prasasti Baru

Sumber: <https://www.kompas.com/stori/read/2024/02/03/150000279/5-prasasti-peninggalan-kerajaan-kahuripan-dan-gambarnya>

Jika diletakkan pada konteks kewilayahan di Asia Tenggara, pola pembangunan kekuasaan oleh Airlangga ini mempunyai kemiripan dengan strategi penguasa lainnya. Misalnya adalah Jayavarman VII dari Kerajaan Khmer setelah kerajaannya mengalami invasi dari Kerajaan Champa (Higham, 2004). Keduanya menghadapi situasi serupa: kehancuran atau *Mahapralaya*, yang kemudian diatasi dengan kombinasi penaklukan militer yang masif dan pembangunan legitimasi baru. Kemudian Jalan Pedang yang dilalui Airlangga mencerminkan pola kepemimpinan *Men of Prowess* - meminjam istilah Wolters - di mana seorang penguasa mesti mampu untuk membuktikan kesaktian dan kemampuan militernya guna menarik loyalitas ke dalam sistem politik Mandala (Wolters, 1999). Perbandingan dengan penguasa lain di Asia Tenggara mengindikasikan bahwa apa yang dilakukan oleh Airlangga merupakan hal yang umum untuk para penguasa pembangun negara (*state-builder*) yang berupaya untuk menyatukan kembali kekuasaan yang terpecah-belah.

Urgensi ditempuhnya Jalan Pedang ini juga didorong oleh adanya kepentingan geostrategis, yakni untuk mengamankan jalur ekonomi, terutama di daerah aliran Sungai Brantas. Musuh yang dihadapi Airlangga bukan hanya membawa ancaman politik, tetapi juga menghalangi proses distribusi barang dari pedalaman ke arah muara sungai di Hujung Galuh. Susanti (2010) telah mengoreksi kesalahpahaman umum bahwa letak Hujung Galuh adalah Surabaya saat ini; namun sebaliknya, Hujung Galuh terletak di lembah Brantas di hulu Desa Kelagen, yang merupakan lokasi Prasasti Kamalagyan masih berada. Lebih lanjut beliau mengusulkan bahwa wilayah kekuasaan Airlangga terletak di tempat yang ideal untuk mengurangi jarak distribusi barang dari Hujung Galuh dan pelabuhan transit di Sungai Bengawan Solo, menuju pelabuhan utama di Kambang Putih yakni Tuban saat ini (Susanti, 2010; Nastiti dkk., 2022). Selama wilayah penting di sepanjang aliran sungai ini dikuasai oleh musuh, Airlangga tentunya tidak dapat mengembangkan basis ekonomi yang kuat untuk memakmurkan kerajaannya. Oleh karena itu, Jalan Pedang menjadi hal perlu dilakukan untuk mengamankan jalur transportasi ekonomi ini. Penaklukan musuh dengan peperangan merupakan langkah awal yang membuka jalan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat. Sehingga pada gilirannya dapat membiayai pembangunan bangunan suci yang juga merupakan cita-citanya.

C. Jalan Batu

Selain menggunakan Jalan Pedang seperti disebut di atas, Airlangga juga menggunakan Jalan Batu atau pembangunan infrastruktur untuk mendapat legitimasi dari rakyatnya. Meskipun jumlah prasasti yang memuat kebijakan pemberian *sima* untuk bangunan suci cenderung sedikit karena Airlangga banyak melakukan peperangan. Bukan berarti Airlangga mengabaikan pembangunan sama sekali. Hardiati dkk., (2010) menyebutkan bahwa dalam Prasasti Pucangan, memperoleh kebahagiaan berupa kerajaan juga termasuk cita-cita Airlangga.

Adanya cita-cita tersebut diwujudkan dengan dikeluarkannya Prasasti Kamalagyan yang berisi *sima* untuk pemeliharaan bendungan yang disebut Waringin Sapta. Perbaikan infrastruktur fisik, dalam kasus ini adalah infrastruktur tata kelola air, tidak hanya digunakan sebagai pengendalian bencana alam, namun juga merupakan suatu langkah strategis untuk meraih kembali legitimasi politik pasca *Mahapralaya* terjadi. Adanya kebijakan dalam Prasasti Kamalagyan tersebut membuktikan bahwa Airlangga menggunakan Jalan Batu ini untuk hadir di tengah rakyatnya. Kebijakan ini juga sesuai dengan *laku* Dewa Indra dalam *astabrata* yakni menurunkan hadiah kepada seluruh rakyatnya (Boechari, 2012a; Utama & Subekti, 2023). Dengan keberhasilan Airlangga dalam mengatasi banjir Brantas yang kerap merusak pertanian, secara efektif Airlangga berhasil menunjukkan kemampuannya sebagai pelindung rakyat. Merupakan suatu syarat yang harus dimiliki penguasa jika ingin mendapatkan kepatuhan dari bawahannya. Keberhasilan dalam pemeliharaan bendungan ini juga dapat dilihat sebagai pengukuhan wibawa penguasa di mata bawahannya tanpa perlu adanya penaklukan.



Gambar 3. Prasasti Kamalagyan

Sumber: <https://www.kompas.com/stori/read/2024/02/03/150000279/5-prasasti-peninggalan-kerajaan-kahuripan-dan-gambarnya>

Kebijakan Jalan Batu yang diambil oleh Airlangga ini sejatinya lebih dari sekadar pembangunan fisik bendungan; melainkan manifestasi dari tata kelola ruang dan air yang kreatif. Analisis lebih lanjut terhadap Prasasti Kamalagyan mengungkap bahwa pemeliharaan bendungan ini adalah upaya sistematis untuk menggabungkan fungsi irigasi pertanian dengan urat nadi jalur perdagangan. Melalui Bendungan Waringin Sapta ini, Airlangga tidak hanya menjamin keamanan pasokan air bagi lahan pertanian, namun juga mengatur aliran Sungai Brantas supaya tetap aman bagi pelayaran domestik maupun internasional di Pelabuhan Hujung Galuh (de Casparis, 1958; Susanti, 2010).

Efektivitas kebijakan ini didukung oleh struktur jabatan yang spesifik, dengan munculnya jabatan-jabatan seperti *hulair* atau *huler* (pengatur irigasi), *matamwak* (pengelola bendungan), serta *hulu wras* dan *wahuta maweas* yang masing-masing bertanggung jawab atas beras dan padi (Susanti, 2010; Setiawan, 2021). Dengan demikian, Jalan Batu ini mesti dilihat sebagai sebuah paket kebijakan ekonomi terpadu yang berhasil menghidupkan kembali produktivitas Jawa bagian timur pasca *Mahapralaya*.

Lebih jauh lagi, keberhasilan Jalan Batu ini menjadi alat diplomasi ekonomi yang cemerlang bagi Airlangga. Dengan mengamankan aliran Sungai Brantas, Airlangga tidak hanya memastikan surplus padi bagi masyarakat, tetapi juga membuka akses pasar yang stabil bagi perdagangan baik domestik maupun internasional (Lombard, 2018). Dalam kasus ini, penetapan status *sima* kepada penduduk desa di sekitar bendungan bukanlah sekadar anugerah biasa, melainkan sebuah kontrak politik yang dibalut dengan basis ekonomi.

Airlangga memberikan anugerah berupa pembebasan pajak dan hak pengelolaan sumber daya sebagai alat tawar untuk mengikat kesetiaan penduduk di wilayah strategis tersebut. Alih-alih menggunakan kekuatan militer, Airlangga memilih pendekatan halus melalui kemakmuran bersama, yang secara efektif menarik daerah-daerah kunci ke dalam orbit kekuasaannya melalui ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan.

Dari sisi sosial-budaya, kebijakan Jalan Batu berupa pemeliharaan bendungan Waringin Sapta oleh Airlangga berfungsi sebagai bentuk ‘ganti rugi’ antara penguasa kepada rakyat setelah terjadinya bencana (Mascarenhas & Wisner, 2012). Kemudian menurut kosmologi Jawa Kuno, air bukanlah sekadar unsur alam biasa, melainkan sebuah elemen sakral yang melambangkan ketentraman dunia, sebagaimana dalam *astabrata* sifat Dewa Indra yang menurunkan hujan (Boechari, 2012; Utama & Subekti, 2023). Karena itu seorang penguasa hendaknya menghujankan hadiah hingga menggenangi dunia (merata ke segenap rakyat) serta melepaskan rakyat dari penderitaan. Keberhasilan Airlangga menjinakkan amukan banjir Sungai Brantas menunjukkan kemampuannya menyelaraskan mikrokosmos (dunia manusia) dengan makrokosmos (alam dewata), sebuah prinsip yang krusial untuk mendapatkan kepatuhan spiritual masyarakat (Heine-Geldern, 1942; Boechari, 2012b). Secara sosial, penetapan status *sima* untuk pemeliharaan bendungan memperkuat kembali ikatan loyalitas desa (*wanua*) yang sebelumnya terfragmentasi, di mana kekuasaan terpusat hadir untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka.

Penerapan Jalan Batu melalui perbaikan infrastruktur tata kelola air oleh Airlangga sejatinya merupakan kelanjutan dari kebijakan yang telah ada pada zaman pendahulunya di Jawa bagian timur, yaitu Pu Sindok. Sebagaimana tercatat dalam Prasasti Wulig (934 M), Pu Sindok melaksanakan kebijakan serupa dengan membangun tiga bendungan sekaligus untuk mengatur aliran sungai guna dimanfaatkan sebagai irigasi pertanian bagi rakyatnya (Fauzi, 2015). Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam konteks strategis di antara keduanya.

Pembangunan bendungan yang dilakukan Pu Sindok cenderung bersifat ekspansif untuk memperkuat basis ekonomi di wilayah yang relatif baru (perpindahan pusat kerajaan yang baru saja terjadi), sedangkan dalam konteks Bendungan Waringin Sapta oleh Airlangga lebih bersifat restoratif. Perbandingan ini menegaskan bahwa dalam sejarah kerajaan di zaman Jawa Kuno, legitimasi seorang penguasa tidak hanya diukur dari kekuatan militer, tetapi juga dari kemampuannya untuk menjamin keberlangsungan kehidupan ekonomi masyarakatnya. Dengan mengadopsi model keberhasilan Pu Sindok dalam konteks infrastruktur bendungan, Airlangga berusaha menempatkan dirinya sebagai ahli waris sah dari trah penguasa Jawa yang mampu mengatur alam untuk kemakmuran rakyatnya.

Dampak jangka panjang dari Jalan Batu ini adalah adanya stabilitas di wilayah kerajaan dengan pengintegrasian secara fungsional antara pusat dengan daerah. Pembangunan akan menciptakan suatu jaring ketergantungan; wilayah pusat membutuhkan wilayah daerah untuk dapat mensuplai logistik serta pemeliharaan infrastruktur di pusat, sementara itu wilayah daerah membutuhkan bantuan dari pusat untuk perlindungan hukum sekaligus jaminan kelancaran dalam berniaga. Pola ekonomi terintegrasi seperti ini sangat efektif untuk meredam adanya potensi pemberontakan di masa Jawa Kuno (Christie, 1998). Dengan demikian, Jalan Batu ini menjadi pemersatu yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan Jalan Pedang; jika Jalan Pedang bersifat menundukkan lawan, maka Jalan Batu ini bersifat merubah lawan atau potensi lawan menjadi mitra untuk menjaga keberlangsungan takhta melalui kelancaran ekonomi bagi mereka sendiri.

D. Jalan Doa

Jalan ketiga yang ditempuh Airlangga demi memperkuat legitimasinya sebagai penguasa adalah Jalan Doa. Wujud atau implementasi dari jalan ini bisa berupa dikeluarkannya kebijakan *sima* untuk suatu bangunan suci, sampai anugerah *sima* untuk seseorang yang hanya sekedar mendoakan Airlangga seperti dalam Prasasti Terep I. Diwujudkannya Jalan Doa dengan penetapan *Sima* bagi bangunan suci adalah pemenuhan cita-cita Airlangga sebagaimana yang disebutkan dalam Prasasti Pucangan yakni memperbaiki bangunan suci (Hardiati dkk., 2010). Selain itu, Jalan Doa juga merupakan suatu strategi fundamental demi mendapatkan legitimasi transendental terutama setelah terjadinya *Mahapralaya*. Peristiwa *Mahapralaya* yang menimpa sebelumnya tidak hanya dimaknai sebagai kehancuran secara fisik, tetapi juga menyebabkan guncangan pada tatanan kosmos; karena itu Airlangga tidak hanya cukup memposisikan dirinya sebagai pemenang perang saja, tetapi juga sebagai seorang *Cakravartin* yang benar-benar dapat mengatur dunia sehingga mampu memulihkan keteraturan kosmos. Prasasti Pucangan secara tekstual menyebut bahwa Airlangga mengaitkan dirinya dengan raja sebelumnya melalui silsilah leluhur dan telah mendapat restu dari dewata, Airlangga menegaskan bahwa kekuasaannya bukanlah hal yang direbut secara paksa, akan tetapi justru mandat dari dewata. Ditetapkannya *sima* untuk sebuah bangunan suci adalah wujud fisik dari adanya mandat tersebut. Hal tersebut akan mengubah persepsi dari rakyatnya bahwa dengan tunduk kepada Airlangga juga merupakan tindakan *dharma* (mematuhi hukum agama).

Selain demi kesalehan pribadi. Kebijakan Jalan Doa yang dilakukan oleh Airlangga juga berperan sebagai alat politik, yakni untuk ‘mengunci’ kekuasaan dengan cara menjalin semacam aliansi dengan para Brahmana atau kaum agamawan lainnya. Struktur pada masa Jawa Kuno menempatkan kaum agamawan sebagai pemegang tertinggi otoritas moral serta memiliki monopoli atas legitimasi suatu ritual. Hal yang dilakukan Airlangga dengan memberikan anugerah berupa *sima* bagi bangunan suci – sebagaimana tercatat dalam prasasti – dengan demikian secara efektif menarik kaum agamawan ini ke dalam lingkaran kuasanya. Para agamawan ini kemudian membuat narasi sakral serta memproduksi prasasti yang berisi pengagungan raja sebagai titisan dewa (Wisnu dalam kasus Airlangga). Adanya dukungan dari kaum agamawan ini tentu lebih mempersulit munculnya oposisi politik, karena penentangan terhadap Raja yang dilindungi kaum agamawan maka sama dengan menentang kehendak dari dewata, tentu sebuah risiko spiritual yang kala itu ditakuti oleh masyarakat. Apalagi menurut Heine-Geldern, (1942) dan Boechari (2012b), masyarakat Jawa Kuno lebih cenderung hidup dalam harmoni dan selalu berusaha menyelaraskan diri antara mikrokosmos (dunia) dan makrokosmos (alam dewata).

Menarik untuk dicermati bahwa Jalan Doa Airlangga ini memiliki pola kronologis yang berbeda apabila dibandingkan dengan penguasa Jawa bagian timur sebelumnya, yaitu Pu Sindok. Pada awal masa pemerintahannya, Pu Sindok tercatat sangat aktif mengeluarkan kebijakan *sima* untuk pembangunan dan pemeliharaan bangunan suci (seperti yang terekam dalam Prasasti Linggasuntan atau Prasasti Gulung-Gulung) (Utama & Subekti, 2023). Bagi Pu Sindok, Jalan Doa

versi dirinya dilakukan di awal sebagai alat untuk memberikan kesan sakral pada wilayah kekuasaan yang relatif baru. Sebaliknya, Airlangga baru melakukan penetapan *sima* untuk bangunan suci justru di fase pertengahan hingga akhir masa pemerintahannya (Alnoza, 2021).

Perbedaan *timing* ini mencerminkan adanya perbedaan dalam dinamika politik: jika Pu Sindok menggunakan agama sebagai fondasi awal untuk stabilitas kekuasaannya, Airlangga justru memposisikan Jalan Doa sebagai ‘segel akhir’ atau pengukuhan atas keberhasilan Jalan Pedang dan Jalan Batu yang telah ia tempuh selama tahun-tahun awalnya. Bagi Airlangga, dikeluarkannya kebijakan terkait agama dalam bentuk bangunan suci adalah simbol kembalinya harmoni kosmos yang telah tuntas, sesuatu yang diperjuangkannya melalui Jalan Pedang dan Batu sebelumnya.

Sementara itu dalam perspektif sejarah wilayah Asia Tenggara, pola Jalan Doa yang dilakukan di akhir masa pemerintahan ini juga memiliki keselarasan lagi dengan Jayavarman VII. Jayavarman VII baru membangun monumen suci besar (seperti Bayon) sebagai wujud syukur serta legitimasi spiritual setelah keberhasilannya dalam mengalahkan bangsa Champa dan kemudian menyatukan kembali kerajaannya yang tercerai-berai (Higham, 2004). Baik Airlangga maupun Jayavarman VII menunjukkan bahwa urusan agama disini bukan hanya masalah keyakinan semata, melainkan juga sebuah alat politik tingkat tinggi untuk mengkonversi kemenangan militer yang bersifat sementara menjadi suatu otoritas suci yang bersifat langgeng serta diakui secara menyeluruh dalam kawasan.

Jalan Doa pada akhirnya mampu menciptakan dasar bagi adanya kestabilan yang tidak dapat diraih dengan Jalan Pedang maupun Batu, yakni berupa kepatuhan secara batiniah. Pembangunan infrastruktur untuk kegiatan keagamaan selanjutnya menjadi pusat pengintegrasian ideologi di mana nilai kesetiaan terhadap penguasa ditanamkan lewat ritual rutin. Penguasa merupakan pusat bagi mikrokosmos yang mencerminkan makrokosmos dewata; karena itu, memelihara harmoni kerajaan dengan ritual adalah keharusan bagi setiap rakyat (Heine-Geldern, 1942; Boechari, 2012b). Melalui Jalan Doa ini, Airlangga mampu mengubah kepatuhan dari rakyatnya yang pada awalnya bersifat koersif (karena takut pedang) serta transaksional (karena kebutuhan ekonomi), menjadi kepatuhan yang bersifat hegemonik (karena kesadaran moral/iman). Bentuk diplomasi secara spiritual inilah yang melanggengkan warisan Airlangga hingga jauh melewati masa hidupnya.

E. Sinergi Tiga Jalan

Kekuasaan yang dibangun Airlangga setelah terjadinya *Mahapralaya* bukan hanya berlandaskan pada satu pilar kekuatan, akan tetapi merupakan hasil sinergitas strategi yang menyelaraskan kekuatan militer, pembangunan ekonomi, dan legitimasi religius secara tepat dan teratur. Keberhasilan dapat dicapai oleh Airlangga dikarenakan kesesuaian tindakannya dengan prasyarat stabilitas suatu negara: ‘Jalan Pedang’ berperan sebagai pembuka jalan (*enabler*) yang pada gilirannya memunculkan stabilitas keamanan dari musuh; terwujudnya kondisi relatif damai ini menjadi syarat mutlak (*sine qua non*) untuk dijalankannya ‘Jalan Batu’, di mana pembangunan infrastruktur –bendungan dalam kasus ini– dapat berjalan sehingga memacu surplus ekonomi dan kemakmuran yang pada gilirannya juga meningkatkan loyalitas dari bawahannya. Langkah

selanjutnya adalah ‘Jalan Doa’, Airlangga seolah menyadari bahwa kesejahteraan materi yang bersifat transaksional rentan terhadap disintegrasi – dalam Prasasti Kamalagyan terdapat ancaman yang membayangkan bahwa situasi belum benar-benar damai saat itu – jika tidak ‘disegel’ dengan loyalitas ideologis yang kuat. Karena itu, ‘Jalan Doa’ ditempuh sebagai pelengkap yang sempurna, mengubah sifat kepatuhan fisik rakyatnya menjadi kepatuhan secara spiritual berdasarkan agama. Sebagaimana Kulke (1993) jelaskan bahwa terwujudnya konsolidasi kekuasaan yang langgeng adalah ketika seorang raja mampu untuk mengubah penaklukan militernya menjadi suatu legitimasi ritual dan kemakmuran. Strategi tripartit tersebut yang secara efektif digunakan Airlangga untuk membangun kembali kekuasaan sekaligus kerajaan leluhurnya yang sempat runtuh.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil memberikan konfirmasi bahwa keberhasilan Airlangga dalam membangun kembali kekuasaan setelah peristiwa Mahapralaya bukan merupakan hasil dari satu strategi tunggal, melainkan sinergi piawai dari sebuah Strategi Tripartit yang mencakup Jalan Pedang, Jalan Batu, dan Jalan Doa. Temuan ini menegaskan bahwa ‘Jalan Pedang’ (militer) berfungsi menciptakan ruang keamanan yang diperlukan bagi ‘Jalan Batu’ (pembangunan infrastruktur) untuk memicu kemakmuran ekonomi, yang kemudian dikunci secara ideologis melalui ‘Jalan Doa’ (legitimasi keagamaan). Pola integratif ini terbukti efektif mengubah kepatuhan yang semula bersifat terpaksa dan transaksional menjadi loyalitas batiniah yang abadi di mata rakyatnya.

Kontribusi utama dari dilaksanakannya penelitian ini adalah memberikan narasi baru sebagai pelengkap bagi narasi arus utama. Jika selama ini pembangunan kekuasaan Airlangga sering dipandang hanya sebagai catatan peperangan yang panjang, penelitian ini menempatkan diplomasi ekonomi dan agama sebagai kekuatan pemersatu yang selevel dengan kekuatan senjata.

Lebih jauh lagi, strategi tripartit ini memiliki implikasi historis yang signifikan bagi kajian politik-ekonomi Nusantara dan kawasan Asia Tenggara pada umumnya. Apa yang dilakukan Airlangga mencerminkan pola kepemimpinan *Men of Prowess* dalam sistem politik Mandala, di mana seorang penguasa mesti membuktikan kesaktian fisik sekaligus karisma spiritual untuk dapat menarik loyalitas ke dalam lingkaran kekuasaannya. Dalam konteks Asia Tenggara, strategi ini memposisikan Airlangga sebagai arketipe *state-builder* (pembangun negara) yang serupa dengan Jayavarman VII dari Kerajaan Khmer dalam merespons bencana besar.

Strategi Tripartit ini menawarkan model konsolidasi kekuasaan yang relevan: bahwa stabilitas negara setelah adanya krisis hanya dapat dicapai melalui keseimbangan antara kekuatan koersif, tata kelola kemakmuran sebagai bentuk ‘ganti rugi’ kepada rakyat, dan penyelarasan tatanan mikrokosmos dengan makrokosmos. Sebagai langkah pengembangan, disarankan adanya studi perbandingan yang mendalam tentang efektivitas ‘Strategi Tripartit’ Airlangga dengan

strategi penguasa Asia Tenggara lainnya untuk membedah lebih luas peran suatu kebijakan dalam pembentukan negara di kawasan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta pertimbangan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dianjurkan peneliti untuk keperluan pengembangan kajian secara lebih mendalam yakni: Perluasan pada sumber data non epigrafis dan dimasukkannya prasasti yang tanpa memiliki angka tahun, penerapan pendekatan lain yakni sejarah lingkungan untuk lebih mendalam dalam mengulas dampak dari adanya kebijakan 'Jalan Batu' oleh Airlangga, penelitian dengan lebih mendalam pada daerah-daerah yang sudah ditaklukan untuk mengetahui adanya dampak 'Strategi Tripartit' terhadap dinamika dari wilayah tersebut serta kemudian perlu juga adanya penelitian spasial dengan melakukan pemetaan terhadap wilayah jaringan perdagangan untuk merekonstruksi jaringan dagang kuno dan dampak ekonomi nyata dari 'Strategi Tripartit' ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alnoza, M. (2021). Arah kebijakan raja pada masa Jawa Kuno pasca peristiwa pralaya dari sudut pandang teori kontrak sosial. *Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat*, 223-233. <https://doi.org/10.24164/prosiding.v4i1.21>
- Andreastuti, S. D., Newhall, C., & Dwiyanto, J. (2006). Menelusuri kebenaran letusan gunung merapi 1006. *Indonesian Journal on Geoscience*, 1(4), 201-207. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17014/ijog.vol1no4.20064>
- Astriaana, S., & Wisnu, W. (2019). Upaya-upaya raja airlangga dalam mensejahterakan rakyat pada Tahun 1019 – 1042 M. *AVATARA e-Journal Pendidikan Sejarah*, 7(1).
- Aulia, F. N., & Wisnu, W. (2023). Kajian historis prasasti dalam jejak kekuasaan raja airlangga di Kota Lamongan pada Abad ke-11. *AVATARA e-Journal Pendidikan Sejarah*, 14(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/56448>
- Boechari. (2012a). Aṣṭabrata. In *Melacak sejarah kuno Indonesia lewat prasasti* (pp. 531-540). Kepustakaan Populer Gramedia.
- Boechari. (2012b). Epigraphic evidence on kingship in ancient Java. In *Melacak sejarah kuno Indonesia lewat prasasti* (pp. 217-223). Kepustakaan Populer Gramedia.
- Brandes, J. L. A. (1913). *Oud-Javaansche oorkonden: Nagelaten transcripties van willen Dr. JLA Brandes uitgegeven door Dr. N.J. Krom*. Albrecht & Co.
- Christie, J. W. (1998). Javanese markets and the Asian sea trade boom of the tenth to thirteenth centuries A.D. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 41(3), 344–381. <http://www.jstor.org/stable/3632418>

- Damais, L. C. (1955). II. Etudes d'épigraphie Indonésienne: IV. Discussion de la date des inscriptions. *Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient*, 47(1), 7-290. <https://doi.org/https://doi.org/10.3406/befeo.1955.5406>
- de Casparis, J. (1958). "Airlangga". *Pidato pengukuhan guru besar Indonesia sedjarah lama dan bahasa sanskerta*, 26 April 1958. Universitas Airlangga.
- Djafar, H. (2016). *Prasasti batu pembacaan ulang dan alih aksara I*. Museum Nasional Jakarta.
- Fauzi, A. N. (2015). Study komparatif peran bengawan Solo dan sungai brantas dalam perkembangan ekonomi abad ke-10 M - 15 M di Jawa Timur. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 3(3), 274-285. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/12389>
- Gonda, J. (1936). Agastyaparwa. *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlanche Indie, VCIV*, 223-285.
- Hardiati, E. S., Djafar, H., Soeroso, Ferdinandus, P. E. J., & Nastiti, T. S. (2010). Zaman kuno. In *Sejarah nasional Indonesia II* (R. P. Soejono & R. Z. Leirissa ed.). Balai Pustaka.
- Heine-Geldern, R. (1942). Conceptions of state and kingship in Southeast Asia. *The far Eastern quarterly*, 2(1), 15-30. <https://doi.org/10.2307/2049276>
- Higham, C. (2004). *The Civilization of Angkor*. University of California Press.
- <https://www.kompas.com/story/read/2026/02/03/150000279/5-prasasti-peninggalan-kerajaan-kahuripan-dan-gambarnya>
- Kulke, H. (1993). *Kings and cults: State formation and legitimation in India and Southeast Asia*. Manohar Publishers & Distributors.
- Lombard, D. (2018). *Nusa Jawa silang budaya 2: Jaringan Asia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mascarenhas, A., & Wisner, B. (2012). Politics: Power and disasters. In *Handbook of Hazards and Disaster Risk Reduction* (pp. 48-60).
- Moniz, A. (2015). The End of days: Tales of apocalypse across time and space. *Huhonu*, 13, 38-42. <https://hilo.hawaii.edu/campuscenter/hohonu/volumes/volume13-2015>
- Muljana, S. (2026). *Tafsir Sejarah Negarakertagama*. LKiS.
- Museum Nasional. (1985). *Prasasti koleksi museum Nasional Jilid I*. Proyek Pengembangan Museum Nasional 1985/1986.
- Nastiti, T. S., Bastiawan, E., & Griffiths, A. (2022). Towards a corpus of inscriptions issued during airlangga's reign in Eastern Java: A Provisional inventory and four new inscriptions. *Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient*, 108, 63-216.
- Nastiti, T. S., Prihatmoko, H., Meyanti, L., Griffiths, A., Bastiawan, E., Levivier, A., & Supriyo, S. (2023). *Laporan survei prasasti zaman hindu-buddha provinsi Jawa Timur di kabupaten Lamongan, Tuban, Jombang, Mojokerto dan Sidoarjo, Tahun 2022*. EFEO & BRIN.
- Nugroho, A. P. (2015). Penelusuran beberapa prasasti pandan di rumah penduduk (Desa Pandankrajan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto). *Berkala Arkeologi*, 35(1), 73-90.

- Schrieke, B. J. O. (2016). *Kajian historis sosiologis masyarakat Indonesia: Penguasa dan kerajaan Jawa pada masa awal* (A. Pratama, Trans.). Penerbit Ombak.
- Setiawan, Y. A. (2021). Latar belakang penetapan sīma bagi pertapaan pada masa pemerintahan airlangga (1019-1043 M). *Kindai Etam: Jurnal Penelitian Arkeologi*, 7(1), 1-16. 10.24832/ke.v7i1.84
- Susanti, N. (2010). *Airlangga: Biografi raja pembaharu Jawa abad XI*. Komunitas Bambu.
- Upaya, G. (2010). The Evolution of Javanese kingship. *Masyarakat, Jurnal Sosiologi*, 15(2), 1-14. 10.7454/MJS.v15i2.1193
- Utama, H. F., & Subekti, A. (2023). Analisis fungsional terhadap kebijakan pemerintahan pu sindok pada abad ke-10 masehi. *PURBAWIDYA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi*, 12(1), 83-102. <https://doi.org/10.55981/purbawidya.2023.162>
- Wibowo, A. S. (2015). Ratu adil dan ratu filsuf platon: Timbangan dan aktualisasinya untuk saat ini. In D. R. Herliany, I. Muhtarom, S. J. Suyono, W. Adi, & Y. Darmawan (Eds.), *Ratu Adil, Kuasa dan Pemberontakan di Nusantara* (pp. 14-43). Penerbit Ombak.
- Wirayudha, R. (2024). *Seputar prasasti pucangan: Artefak dengan dua inskripsi berbeda aksara dari abad ke-11 yang memuat riwayat dan legitimasi raja airlangga. Diangkut Raffles ke India*. Historia. Diakses pada 30 April 2026, dari <https://www.historia.id/article/seputar-prasasti-pucangan-6jx35>
- Witasari, V. H. (2009). *Prasasti pucangan sansekerta 959 saka (suatu kajian ulang)*. Universitas Indonesia.
- Wolters, O. W. (1999). *History, culure & region in Southeast Asian perspective*. Cornell University Southeast Asia Program Publications/ISEAS.